



## **Budaya dalam Agenda 2030: Upaya dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals di Kota Pekalongan**

**Endah Tarwiyani Yuniar, Hermini Susiatiningsih, Fendy Eko Wahyudi**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*UNESCO as an official UN agency, contributes to the successful implementation of the development agenda known as the SDGs through one of its programs, UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Pekalongan as a member of UCCN is required to be able to create a creative city that can support the achievement of the SDGs. This study is aimed at how the Pekalongan City Government, as a member of the UCCN, is working to achieve the SDGs through Pekalongan Batik culture according to the UCCN framework through the concept of sustainable development. Furthermore, this study will also analyze the behavior of the Pekalongan City Government towards UCCN cooperation using three compliance indicators, namely output, outcome, and impact. This research uses a qualitative descriptive approach with sources obtained from interviews and literature studies and analyzed using content analysis techniques. The findings of this study show that the Pekalongan City Government has implemented the UCCN mandate to make culture an important component in achieving the SDGs by involving people from all backgrounds of life. . By making batik as a driving force in achieving the SDGs, batik production in Pekalongan City can also have good resilience during a crisis.*

*Keywords: UCCN, UNESCO, SDGs, Batik, Pekalongan City.*

### **PENDAHULUAN**

PBB telah resmi mengadopsi agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang dikenal dengan SDGs yang mana agenda tersebut memerlukan partisipasi seluruh aktor internasional untuk mencapai 17 tujuan dan 169 target yang telah dirumuskan. UNESCO sebagai agensi yang berada di bawah naungan PBB jelas ikut serta dalam upaya menyukseskan SDGs, misalnya melalui salah satu program kerjanya yang dikenal dengan UNESCO Creative Cities Networks (UCCN). UCCN bertujuan untuk mengokohkan kerja sama antarkota yang telah mengenali kreativitas sebagai unsur strategis pembangunan berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

Kota Pekalongan merupakan wakil pertama dari Indonesia dan Asia Tenggara yang berhasil masuk ke dalam jaringan tersebut pada tahun 2014 dalam kategori Kota

Kreatif versi Cities of Crafts and Folk Art. Dengan membawa batik sebagai budaya yang telah berkembang sejak lama di dalam hidup masyarakatnya, Kota Pekalongan diakui oleh UNESCO menjadi teladan bagaimana kreativitas dan budaya dapat mendukung masyarakat dalam mengembangkan kegiatan yang meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup mereka. Namun demikian, perkembangan batik di Kota Pekalongan mulai mengundang perhatian karena limbah dari produksi memberikan dampak buruk bagi lingkungan yang mana bertentangan dengan tujuan SDGs.

Dengan bergabungnya Pekalongan ke dalam Kota Kreatif dunia versi UNESCO, Pemerintah Kota Pekalongan berarti harus berkomitmen dalam mengembangkan budaya membatik, di saat yang sama ia harus memastikan perkembangan batik tidak mengganggu elemen-elemen keberlanjutan sehingga dapat mewujudkan poin-poin SDGs. Oleh karena itu penelitian ini akan melihat lebih jauh bagaimana Pemerintah Kota Pekalongan sebagai anggota jaringan kota kreatif UNESCO akan menggunakan batik sebagai elemen pendorong untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa penelitian telah menjelaskan bagaimana pentingnya memahami SDGs dan cara mengimplementasikannya. Biermann et al. (2017) mengatakan untuk mencapai tujuan SDGs harus melampaui dari sekedar cara tradisional, seperti bergantung pada laporan nasional saja. Kesuksesan implementasi SDGs membutuhkan kolaborasi yang efektif dari pemerintah global dan nasional itu sendiri. Mengkaji dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, pelaksanaan SDGs di Indonesia masih dilakukan oleh golongan tertentu saja. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan SDGs di Indonesia masih bersifat teknokratis dan tidak memberikan pembangunan berkelanjutan peran yang sentral karena hanya menjadi prioritas kedua setelah kemajuan infrastruktur dan stabilitas politik (Agussalim et al., 2019). Pelaksanaan yang seperti itu membuat adanya kesadaran dan pemahaman yang rendah untuk mencapai tujuan SDGs baik di lingkup masyarakatnya maupun lembaga pemerintahan itu sendiri (Arianto, 2018). Kemudian berkaitan dengan peran kota kreatif dalam mewujudkan SDGs, menurut Deborah Stevenson (2020) masih sedikit perhatian yang tercurah pada UNESCO Creative Cities Networks (UCCN), dampaknya untuk mengartikan tentang apa yang keberlanjutan dapat dan seharusnya bermakna bagi para anggota jaringan kota kreatif juga akan mengalami tangan yang besar.

Menimbang berbagai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam tulisan ini penulis berfokus pada pembahasan bagaimana implementasi SDGs di Indonesia dapat dilakukan oleh aktor domestik yaitu Pemerintah Kota dan masyarakat sipil menggunakan budaya batik dengan melokalisasikan SDGs melalui framework kota kreatif UNESCO yang sebelumnya dianggap kurang populer. Dalam hal ini, penulis ingin melihat bagaimana kerangka kota kreatif UNESCO dapat membuat industri kreatif batik di Pekalongan harus menyesuaikan konsep keberlanjutan yang menjadi akar dalam framework UCCN untuk mencapai SDGs. Penelitian ini akan menggunakan konsep budaya batik, pembangunan berkelanjutan, dan teori kepatuhan yang memberikan panduan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kota Pekalongan mewujudkan SDGs melalui batik dan kesesuaian perilaku Pemerintah Kota Pekalongan dengan *framework* UCCN.

Kemudian ini akan berfokus pada satu budaya khusus, yaitu budaya membatik. Batik menurut Nik Krevitsky (1964:7) adalah sebuah teknik menggambar pola pada kain dengan cara menutupi sebagian pola menggunakan lilin malam dan mewarnai bagian yang tidak ditutupi lilin malam. UNESCO mendefinisikan Batik Indonesia sebagai sebuah teknik, simbolisme, dan budaya yang melingkupi kain dan sutra yang diwarnai dengan tangan (UNESCO, 2009). Secara umum, batik di Indonesia dibedakan menjadi

dua yaitu, Batik Pedalaman dan Batik Pesisiran (Elliott, 1984; Stephenson, 1993; Tirta, 2009). Adapun batik yang secara khusus di bahas dalam tulisan ini merupakan Batik Pekalongan yang merupakan salah satu batik yang berkembang di wilayah pesisir, di mana batik di wilayah ini berkembang dengan bebas dan bervariasi, baik dari motif maupun warnanya. Batik di daerah pesisir kebanyakan dikembangkan untuk tujuan utama komersial sehingga tradisi dan simbolisme dijadikan kepentingan sekunder (Stephenson, 1993: 110). Untuk memberikan batasan pada definisi batik yang akan dibahas, penelitian ini akan berfokus pada Batik Pekalongan yang merupakan kerajinan dan seni yang dihasilkan dari proses menutupi bagian di atas kain malam menggunakan lilin malam dan mewarnai bagian lainnya menggunakan pewarna, di mana hal tersebut dikembangkan untuk tujuan utama komersial daripada dikembangkan untuk sekedar memenuhi tradisi dan simbolisme.

Sementara itu, untuk mengidentifikasi kepatuhan suatu aktor, Mitchell (2007:896-897) memberikan tiga indikator untuk dapat menilai kepatuhan tersebut. Adapun indikator tersebut adalah *output*, *outcome*, dan *impact*. *Output* (luaran) dapat berupa hukum, kebijakan, dan regulasi yang suatu aktor adopsi untuk mengimplementasikan perjanjian luar negeri berupa hukum internasional ke dalam hukum domestiknya. Kedua, *Outcome* (hasil) adalah bagaimana perubahan perilaku aktor muncul sebagai hasil dari implementasi kebijakan internasional tersebut. Kemudian *Impact* (dampak) digunakan untuk melihat kualitas yang ditimbulkan dari implementasi perjanjian yang disepakati melalui bukti-bukti yang ada di lapangan. Indikator kepatuhan tersebut nantinya akan digunakan untuk melihat sejauh mana Kota Pekalongan telah menjalankan komitmennya sebagai anggota jaringan kota kreatif (UCCN). Kemudian, indikator ini juga dapat menilai upaya apa saja yang telah dilakukan Pekalongan sebagai anggota UCCN dalam mewujudkan poin-poin pembangunan berkelanjutan. Adanya indikator kepatuhan juga dapat diunakan untuk memperkirakan perilaku Pemerintah Kota Pekalongan terhadap sebuah kerjasama internasional.

Adapun teknik yang digunakan dalam megumpulkan data-data penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Setelah data-data terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk dapat menaksir dan menganalisis keberadaan, makna, dan keterkaitan kata, tema, atau konsep tertentu.

## PEMBAHASAN

### Strategi Pemerintah dalam Mewujudkan Kota Kreatif versi UNESCO

Mempersiapkan diri menjadi kota kreatif merupakan sebuah proses yang kompleks. Terlebih untuk mewujudkan agenda kota kreatif dengan menjadikan budaya sebagai unsur strategis di dalamnya memerlukan persiapan dan proses yang panjang agar dapat dieksekusi dengan baik. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana Pemerintah Kota Pekalongan merencanakan terbentuknya sebuah kota kreatif dengan menjadikan budaya batik sebagai pusat dari pertumbuhannya.

Untuk menjadikan Kota Pekalongan sebagai kota kreatif dalam kategori Kerajinan dan Seni Rakyat, Pemerintah Pekalongan mengajukan rencana aksi berikut ini untuk menjadi panduan kepada UNESCO: 1) Menjadikan tradisi batik dan perpaduan uniknya yang mencakup seni, kerajinan, dan pendapatan bagi masyarakat Kota Pekalongan; 2) mengembangkan infrastruktur sosial, budaya dan ekonomi yang terkait dengan proses pembuatan Batik; 3) penguatan kelembagaan terkait dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendorong pendidikan tentang

Batik, serta menjaga dan mengembangkan budaya Batik; 4) pembinaan ekonomi kreatif melalui dukungan klaster dan sentra khusus Batik serta meningkatkan upaya promosi Batik di tingkat lokal, nasional dan global; 5) menciptakan jaringan kolaboratif dengan pemangku kepentingan akademisi, pemerintah dan masyarakat sipil di industri Batik; 6) mempromosikan batik ramah lingkungan; 7) mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan sektor Batik.

Ketujuh rencana yang memberikan panduan bagaimana Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan budaya sebagai inti pembangunan kota kreatif ini kemudian mengantarkan Kota Pekalongan menjadi bagian UCCN pada 2014. Adapun tujuh rencana tersebut kemudian harus dipertanggung jawabkan setiap empat tahun sekali sesuai dengan ketentuan dari UNESCO. Sejauh ini Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan pertanggung jawaban kepada UNESCO pada 2018, empat tahun sejak masuk ke dalam jaringan tersebut.

Kemudian Pemerintah Kota Pekalongan juga harus melakukan strategi baru untuk mempertahankan posisinya sebagai kota kreatif tingkat internasional yang menjadi teladan bagaimana budaya dan kreativitas dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Rencana aksi tersebut dapat dilihat dari terbentuknya Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan 2020-2014 yang diterbitkan oleh Bappeda Kota Pekalongan. Dalam Roadmap tersebut, disebutkan bagaimana seni kriya bersama dengan seni pertunjukan dan kuliner menjadi prioritas dalam mengembangkan Kota Kreatif.

Klaster seni kriya akan menjunjung branding Kota Pekalongan sebagai The World City of Batik. Adapun arah kebijakan terhadap pengembangan seni kriya di Kota Pekalongan dikenal dengan “Penguatan Regulasi menuju Pekalongan sebagai Creative Hub dengan branding World City of Batik”. Strategi untuk mencapainya antara lain: 1) penguatan regulasi dan kelembagaan Pengembangan seni kriya/batik; 2) pengembangan ekosistem seni kriya batik melalui penyediaan infrastruktur pendukung, pemberdayaan pelaku ekraf seni/kriya batik, dan pengembangan teknologi serta aplikasi IT; 3) Penguatan marketing seni/kriya batik berbasis kolaborasi melalui *chanelling* dan *marketing* produk seni/kriya batik. Dengan mewujudkan rencana aksi tersebut, Pemerintah kota Pekalongan berupaya untuk terus mempertahankan keanggotaannya dalam UCCN dengan menjadikan kriya seni batik sebagai elemen penting dalam mewujudkan Kota Kreatif Pekalongan.

### **Analisis Upaya Perwujudan Kota Kreatif Pekalongan Menurut Framework UCCN**

UNESCO Creative Cities Network (UCCN) adalah salah satu wadah yang disediakan UNESCO untuk menunjukkan bagaimana budaya dapat mendukung berwujudan SDGs. Jaringan kota kreatif yang sudah dibentuk sejak 2004 ini saat ini sudah memiliki 246 anggota yang terdiri dari berbagai kota diseluruh dunia untuk bekerjasama dalam menempatkan kreativitas dan industri budaya di jantung rencana pembangunan mereka di tingkat lokal dan bekerja sama secara aktif di tingkat internasional. Pekalongan dengan batiknya berhasil menjadi wakil pertama Indonesia yang bergabung dalam jaringan tersebut.

Sebagai anggota UCCN, Pekalongan wajib memenuhi komitmen UCCN untuk berbagi praktik terbaik, mengembangkan kemitraan yang mempromosikan kreativitas dan industri budaya, memperkuat partisipasi dalam kehidupan budaya dan mengintegrasikan budaya dalam rencana pembangunan perkotaan. Lebih jauh, Kota Pekalongan juga harus menunjukkan bagaimana Batik Pekalongan juga dapat

mendukung pencapaian Agenda 2030. Dengan demikian, perlu adanya analisis lebih lanjut bagaimana tujuan dan aturan dari UCCN tersebut mempengaruhi perilaku Pemerintah Kota Pekalongan dalam membangun kota kreatif.

Menurut Ronald B. Mitchell untuk melihat bagaimana pengaruh suatu kerjasama terhadap tindakan suatu aktor terdapat tiga indikator untuk mengidentifikasi perilaku tersebut, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact* (Mitchell, 2007: 896-897).

*Output* menurut Mitchell adalah bentuk hukum kebijakan, kebijakan, dan aturan domestik yang dibuat untuk mewujudkan kerjasama internasional yang disepakati (Mitchell, 2007: 896-897). Dalam menjadikan batik sebagai inti dari pembangunan keberlanjutan Pemerintah Kota Pekalongan sudah menetapkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Batik. Adapun perda tersebut diantaranya adalah: 1) Perda Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2009 yang mengatur tentang kurikulum pendidikan dan pelatihan budaya membatik di tingkat SD, SMP, SMK; 2) Perda Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 yang memberikan aturan terkait ketersediaan bahan baku batik; 3) Surat Edaran Walikota Pekalongan Nomor 005/04311 yang mengatur penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemkot Pekalongan.

Adapun *outcome* atau hasil merupakan perubahan perilaku atau hasil dari implementasi kebijakan internasional tersebut (Mitchell, 2007: 896-897). Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Pekalongan dengan batiknya menjalankan komitmen yang sudah disepakati, penulis akan menganalisisnya berdasarkan tiga pilar keberlanjutan yang terdapat dalam agenda 2030. Analisis menggunakan tiga pilar keberlanjutan ini juga untuk menjelaskan bagaimana pelestarian batik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa kini juga di masa mendatang.

Pertama dari pilar ekonomi, produksi Batik Pekalongan erat kaitannya dengan definisi ekonomi kreatif versus UNCTAD. ekonomi kreatif adalah konsep yang berkembang berdasarkan aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Ekonomi kreatif dalam definisi ini dapat mendorong penciptaan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan ekspor sambil mempromosikan inklusi sosial, keragaman budaya dan pembangunan manusia. Selain itu ekonomi kreatif juga dapat mencakup aspek ekonomi, budaya dan sosial yang berinteraksi dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan pariwisata (UNCTAD, 2008 :15). Dari definisi yang ada dapat dilihat bahwa Batik merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi yang dapat menggerakkan pencapaian pilar-pilar SDGs yang lain. Hal ini disebabkan karena kerajinan Batik Pekalongan identik dengan komoditas komersial dengan proses produksi yang melibatkan unsur kreativitas yang kuat. Dengan demikian, pelestarian Batik Pekalongan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang mendukung tercapainya pilar sosial dan lingkungan.

Upaya pemerintah Pekalongan dalam menjadikan batik sebagai pusat dari ekonomi kreatif dapat dilihat dari memberikan dukungan penuh atas kolaborasi seni kriya batik dengan *fashion* dan desain produk. Dengan demikian, Batik Pekalongan dapat semakin berkembang mengikuti selera *fashion* yang sedang diminati pasaran. Produk batik diolah menjadi berbagai macam barang yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat seperti baju, dress, celana, dekorasi rumah, masker, dan sebagainya. Pesatnya perkembangan inovasi batik di Pekalongan ini jelas membuka berbagai kesempatan ekonomi. Berkat industri batiknya, lapangan kerja di Pekalongan terus terbuka untuk memproduksi berbagai macam produk batik. Produksi Batik Pekalongan berhasil menyerap tenaga kerja mencapai 12.937 orang (Kementerian Perindustrian, 2017). Industri pengolahan di Kota Pekalongan merupakan sektor utama yang menyerap

perekonomian di Kota Pekalongan dengan jumlah 36,24 persen pekerja yang mana jumlah tersebut disokong oleh industri kreatif batik (BPS, 2020: 8).

Lebih lanjut untuk memberikan kesempatan terbukanya lebih banyak lapangan kerja dan pasar bagi produk Batik Pekalongan, Pemerintah secara rutin mengadakan berbagai perlombaan serta festival dengan tema Batik Pekalongan untuk memicu tumbuhnya ide baru dalam perkembangan industri batik. Berdasarkan roadmap kota kreatif, pemerintah memiliki rangkaian acara bertema kebudayaan yang ditandai dengan dibentuknya Kalender Even Seni Kriya Pekalongan (Batik Fusion). Batik Fusion ini merupakan gabungan dari Pekan Batik, Batik Night Market, Kirab Batik. Adapun dari festivalnya, terdapat tiga festival batik yang secara konsisten diadakan tiap tahunnya, yaitu Perayaan Hari Jadi Kota Pekalongan (April), Festival Kreativitas dan Inovasi Pekalongan (Agustus), dan Pekan Batik Pekalongan (Oktober). Festival-festival ini jelas membuka kesempatan ekonomi pada sektor-sektor lain seperti sektor kuliner hingga pertunjukkan mengingat pada tahun 2019 Pameran Pekan Batik Pekalongan, yang menjadi pameran andalan di sana, berhasil mendatangkan 85.442 pengunjung dengan total transaksi senilai Rp7,411 miliar (ANTARA, 2019). Lebih lanjut untuk mengembangkan iklim bisnis tersebut, pemerintah setempat juga berencana mengadakan project pilot inkubasi bisnis yang rencananya diselenggarakan pada 2022-2024 sesuai timeline pada Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Masih dari sektor ekonomi, pemerintah berusaha untuk menggunakan IT dalam rangka mendukung berbagai industri termasuk industri kreatif batik yang menjadi pusat kriya di Kota Pekalongan dengan memberikan pelatihan digital marketing hingga meluncurkan berbagai aplikasi dan inovasi dari IT lainnya. Pada tahun 2021, kurang lebih 260 UMKM ditargetkan untuk mengikuti pelatihan digital marketing tiap bulannya, 260 UMKM itu termasuk para pelaku usaha batik batik (Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan, 2021). Tak hanya itu saja, dorongan untuk mengembangkan penjualan batik di era pandemi juga diperkuat dengan meluncurkan Aplikasi Digiretail Lokapasar Batik Setono. Aplikasi ini memungkinkan penjualan tanpa tatap muka. Lokalpasar batik juga memungkinkan jangkauan distribusi yang semakin luas dan mudah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020). Kemudian, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mengintegrasikan Aplikasi Batik Augmented Reality di destinasi wisata budaya seperti Museum Batik dan kampung-kampung Batik yang ada pada 2021-2024.

Perkembangan budaya batik di Pekalongan juga membuka kesempatan bagi sektor pariwisata untuk maju. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk mengembangkan *crative hubs* yang mengangkat tema wisata kota (urban tourism dan memiliki beberapa kegiatan unggulan yang ditawarkan, di antaranya adalah shopping, urban heritage, dan aktivitas kota lainnya. Adapun tempat-tempat wisata yang dikembangkan di antaranya adalah Selain itu, *creative hubs* ini juga memiliki fungsi untuk menjadi kawasan wisata belanja, edukasi, serta pelatihan budaya. Kota Pekalongan menciptakan dan membina kampung-kampung budaya. Adapun kampung-kampung budaya itu antara lain Kampung Batik (Kauman, Pesindon, dan Banyurip), Kampung Budaya Sumbawan, Kampung Canting (Landungsari dan Kradenan), Kampung Tenun (Medono). Di samping kampung batik, terdapat pula grosir atau pasar batik di Setono yang letaknya dekat dengan pintu keluar tol, pasar ini menawarkan berbagai kerajinan batik dalam berbagai bentuk yang dapat menjadi oleh-oleh setelah berkunjung di Kota Pekalongan. Kedua dari pilar sosial, budaya daoat digunakan untuk memenuhi hak-hak dasar manusia sebagai makhluk hidup yang berkualitas secara adil dan setara dengan

maksud meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan menjadi media pendidikan, pemberdayaan, kesetaraan, dan pemberian identitas bagi masyarakat.

Dari sektor pendidikan, Kota Pekalongan telah mengintegrasikan batik ke dalam kurikulum pendidikan SD, SMP, dan SMK. Tak hanya dimasukkan dalam kurikulumnya, beberapa fasilitas pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi di Kota Pekalongan menjadikan batik sebagai pilihan fokus studinya. Di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), SMK Negeri 3 Pekalongan menyediakan tiga program keahlian yang mana satu di antaranya adalah Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Di tingkat perguruan tinggi, Universitas Pekalongan menyediakan program studi Teknologi Batik. Program studi tersebut merupakan satu-satunya yang ada di dunia (KWRI UNESCO, 2017).

Pelatihan batik juga diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga akses terhadap batik dapat merata ke seluruh masyarakat di Kota Pekalongan. Pelatihan ini juga kembali menunjukkan bagaimana batik dapat diakses oleh semua kalangan tanpa memandang umur, jenis kelamin, ataupun latar belakang ayahnya. Misalnya, untuk merangkul kaum marginal yang ada di Kota tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan juga menyediakan pelatihan dalam membuat kerajinan batik bagi para narapidana agar mereka dapat melanjutkan hidup. Bahkan batik buatan para narapidana ini sangat laris di pasaran (Lembaga Pemasaryatan Kelas II A Pekalongan, 2021). Pelatihan batik juga diberikan kepada perempuan yang biasanya menjadi kelompok yang sering kali tersisihkan dalam agenda pembangunan. Pemerintah Kota Pekalongan secara berkala memberikan pelatihan baik itu secara praktes maupun workshop yang menargetkan para perempuan di Kota Pekalongan. Salah satu workshop tersebut digelar pada akhir tahun 2021 di museum batik Kota Pekalongan. Workshop ini memberikan pelatihan terkait batik dengan harapan dapat memberikan bekal bagi kaum perempuan untuk terus bertahan di masa pandemik (Pemerintah Kota Pekalongan, 2021).

Budaya sebagai perantara dalam memberdayakan perempuan bahkan sejak lama sudah melekat pada tradisi batik pekalongan. Cerita sejarah batik di Pekalongan bahkan sebagian besar berkisah tentang para wirausahawan perempuan dari berbagai macam etnis (Elliott, 1984: 102). Batik merupakan wadah perempuan Pekalongan mengisi waktu luang mereka untuk menunggu musim panen (Veldhuisen, 2007: 28). Hal ini karena batik dapat dikerjakan dari rumah sehingga perempuan dapat tetap mengurus keluarga mereka sambil tetap bekerja. Batik sebagai aktivitas pengisi waktu luang akhirnya terus tumbuh dari generasi ke generasi di Kota Pekalongan. Seiring batik yang semakin dikenal produksi batik pun kian meningkat begitu pula serapan tenaga kerja di sektor tersebut. Setidaknya saat ini, dari total tenaga kerja yang ada di sektor batik Kota Pekalongan, 60% dari jumlah tersebut merupakan pekerja perempuan (UCLG, 2018).

Dalam pelestarian batik sebagai identitas dari masyarakat, berbagai aktor di Kota Pekalongan ikut serta menyukseskan tujuan ini. Adapun salah satu contoh program pelestarian ini dapat diliha dari program pendidikan dan pelatihan Batik Indonesia warisan budaya takbenda bagi siswa SD, SMP, SMA, SMK dan Politeknik yang diprakarsai oleh Museum Batik Kota Pekalongan dengan kerjasama yang erat bersama otoritas pendidikan Kota Pekalongan. Program ini terus dikembangkan hingga berhasil berkolaborasi dengan berbagai daerah sekitar seperti Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Pemalang hingga Tegal dan masih rutin dilakukan tiap tahunnya. Program tersebut keefektifannya telah dibuktikan melalui evaluasi dan dianggap telah memberikan sumbahsiah yang besar, diantara adalah: (a) menjaga warisan budaya takbenda dengan memastikan pewarisannya kepada generasi berikutnya, (b) memastikan penghormatan terhadap warisan budaya takbenda dengan memberikan Batik Indonesia tempat terhormat

sebagai lokal muatan dalam kurikulum berbagai strata pendidikan formal, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga politeknik, dan (c) meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya takbenda di tingkat lokal, nasional dan semoga internasional. Berkat kesuksesannya, program inisiatif oleh Museum Batik dengan pemerintah pemda setempat tersebut tersebut dipilih pada tahun 2009 dalam Daftar *Good Safeguarding Practices* oleh UNESCO (UNESCO, 2009).

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pengrajin batik adalah dengan memberikan payung hukum untuk melindungi produksi batik pekalongan dengan memberikan branding yang lebih baik. Usaha perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan di antaranya dengan memberikan sertifikasi untuk para pembatik dengan tujuan menjamin Hak Kekayaan Intelektual (HKI) para pengrajin batik. Adapun sertifikasi ini sudah pernah diselenggarakan pada tahun 2019 dengan 100 orang yang mengikuti sertifikasi yang difasilitasi oleh Bekraf (DINPERINAKER Kota Pekalongan, 2019). Kemudian, program sertifikasi ini juga kembali dilanjutkan untuk periode 2023-2034 sesuai dengan yang tertulis pada Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Di samping itu, perlindungan hukum untuk menjamin kesejahteraan pengrajin batik dan perlindungan bagi konsumen juga diwujudkan dengan membuat hologram batik untuk melihat keaslian batik pekalongan yang di beli. Hologram ini disempurnakan menggunakan QR-Code sehingga konsumen dapat mengecek secara langsung tentang keaslian batik yang dibeli (ANTARA Jateng, 2018). Kemudian pemerintah Kota Pekalongan dengan Universitas Indonesia dengan melakukan kesepakatan terkait indikasi geografis batik. Hal ini merupakan upaya untuk melestarikan produk andalan batik yaitu sarung batik asli pekalongan sebagai perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) (ANTARA, 2020).

Ketiga dari pilar lingkungan, pemerintah berupaya untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh penggunaan air tanah berlebihan dari rumah tangga dan industri batik serta pencemaran lingkungan. Beberapa waktu terakhir Kota Pekalongan sering kali menjadi sorotan di berita lantaran banjir rob yang kerap melanda wilayahnya (CNN, 2020; Kompas TV, 2021). Isu pencemaran lingkungan oleh limbah batik di Kota Pekalongan bahkan pernah mengisi headline di berita internasional (BBC, 2021).

Oleh karena itu, Pemerintah Pekalongan berusaha untuk mengurangi dampak buruk akibat produksi batik, seperti penurunan permukaan tanah dan pencemaran lingkungan dengan melakukan berbagai kerjasama. Tak hanya melalui pembangunan infrastruktur pendukung, Pemerintah Kota Pekalongan juga secara aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat mengatasi masalah lingkungan ini. Adapun kerjasama ini sudah dilakukan di tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat internasional, Pemerintah Kota Pekalongan dengan Kabupaten Pekalongan menjalin kerjasama dengan Negara Belanda. Pemilihan Belanda sebagai mitra kerjasama karena Belanda telah memiliki pengalaman selama 850 dalam mengelola air dengan sistem *Dutch Water Board*. (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2017). Sementara itu, di tingkat lokal pemerintah Kota Pekalongan bersama Kabupaten Pekalongan juga Kabupaten Batang melakukan kerjasama terkait pembangunan daerah yang mengatur sistem pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan serta pengelolaan limbah yang mengalir dari hilir ke hulu sungai, serta ketersediaan air bersih pada 2019 lalu (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019).

Kemudian, kerjasama dan penelitian dengan mitra yang berasal dari beberapa universitas di Indonesia juga dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan, khususnya

yang masih berkaitan dengan batik seperti limbah dan banjir. Pemerintah Kota Pekalongan dengan Universitas Diponegoro telah menyepakati kerjasama yang tertuang dalam MoU berkaitan dengan pengembangan Technopark Perikanan, Pemberdayaan Nelayan, Penanggulangan ROB, Pengerukan Muara, dan sebagainya (PKMBRP UNDIP, 2018). Adapun dengan Universitas Negeri Jenderal Soedirman Pemerintah Kota Pekalongan bekerjasama untuk mengelola limbah batik dengan memanfaatkan jamur dengan tujuan limbah yang dibuang telah difilter terlebih dahulu sehingga aman bagi lingkungan. (Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan, 2020).

Pemerintah Kota Pekalongan juga akan membangun infrastruktur pendukung produksi batik yang dapat mengurangi dampak buruk bagi lingkungan. Dalam Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan 2020-2024, menjelaskan upaya yang harus ditempuh untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang ada agar ekonomi kreatif di Kota Pekalongan dapat terwujud secara berkelanjutan. Menurut roadmap tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan akan membangun IPAL komunal limbah batik sebagai infrastruktur pendukung kriya batik yang dapat mengurangi dampak negative dari produksi batik. Rencana ini direalisasikan sejak tahun 2021 – 2024.

Pelestarian batik yang ramah lingkungan juga dimulai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Untuk menanamkan kesadaran dan informasi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan aktif memberikan berbagai pelatihan berkaitan dengan produksi batik yang ramah lingkungan. Menyadari perlunya sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat agar mereka sadar terhadap konsekuensi lingkungan dari produksi batik, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan secara rutin tiap tahunnya selalu menggelar Pelatihan Pengembangan Proses Produksi Bersih. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat memberikan informasi terkait penerapan metode dan teknologi yang efisien dan tepat untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik dengan sistem produksi yang ramah lingkungan (DINPERINAKER Kota Pekalongan, 2020, 2021).

Pelatihan produksi batik ramah lingkungan juga sering kali mengangkat tema penggunaan pewarna alam. Misalnya pada Pekan Batik 2019, Pemerintah Kota Pekalongan menyelenggarakan lokakarya yang tema “Batik Masa Depan Back to Nature”. Lokakarya ini memberikan dorongan kepada para pelaku usaha kreatif batik untuk meninggalkan pewarna kimia dan berganti menggunakan pewarna alam yang ramah lingkungan. Salah satu narasumber yang dihadirkan dalam lokakarya tersebut adalah R. Hoesein Eddy Winoto, seorang pelaku usaha batik yang produknya menggunakan pewarna alam bersumber dari limbah kulit tanaman bakau. Lokakarya ini juga memberikan alternatif terhadap kelangkaan pewarna sintetis di masa depan (KMNIU, 2019).

### **Analisis Kesesuain Perilaku Kota Pekalongan terhadap Mandat UCCN dalam mewujudkan SDGs**

Pelestarian Batik di Kota Pekalongan sampai sekarang masih berlangsung di berbagai sektor, baik itu sektor ekonomi, sosial hingga lingkungan. Pelestarian yang melibatkan berbagai pilar keberlanjutan tersebut pada akhirnya mendorong perwujudan SDGs di Kota Pekalongan. Konsep SDGs bisa jadi terdengar asing di masyarakat hal ini yang kemudian menghambat proses implementasi untuk meraih tujuan-tujuan yang ditetapkan. Akan tetapi, budaya merupakan sebuah konsep yang ramah bagi masyarakat sehingga menjadikan budaya sebagai alat untuk memajukan pilar-pilar keberlanjutan memberikan kemudahan tersendiri untuk mewujudkan SDGs di sebuah daerah. Dengan

demikian budaya merupakan sarana lokalisasi SDGs yang dapat merangkul semua kalangan masyarakat yang dapat memenuhi janji dalam Agenda 2030, “Leave No One Behind”. Dengan melakukan lokalisasi SDGs melalui budaya Batik Pekalongan, berarti Pemerintah Kota Pekalongan sudah berkomitmen terhadap aturan salah satu aturan yang disepakai UNESCO.

Menjadi anggota UCCN, berarti setiap kota harus mematuhi segala aturan dan kewajiban yang diberikan oleh UNESCO. Kewajiban tersebut meliputi untuk aktif bekerjasama dengan para anggota UCCN dan memberikan laporan secara berkala terhadap UNESCO terkait bagaimana membangun kota kreatif yang berkelanjutan. Adapun kewajiban sebagai anggota UCCN dapat dilihat pada dokumen UNESCO *Mission Statement* yang sudah menjadi dasar dari kerjasama UCCN. Dalam *Mission Statement* juga disebutkan bagaimana anggota jaringan harus mewujudkan tujuan UCCN yang meliputi (UNESCO, 2004): 1) Memperkuat kerjasama internasional antara kota-kota yang telah mengakui kreativitas sebagai faktor strategis dalam pembanguann berkelanjutan; 2) Merangsang dan memperkuat prakarsa yang dipimpin oleh para anggota untuk menciptakan kreativitas sebagai elemen penting dalam pembangunan perkotaan, melalui partnership yang melibatkan sektor publik dan privat serta masyarakat sipil; 3) Memperkuat penciptaan, produksi, distribusi dan penyebaran kegiatan budaya, barang dan jasa; 4) Mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi serta memperluas peluang bagi pencipta dan profesional di sektor budaya; 5) Meningkatkan akses dan partisipasi dalam kehidupan berbudaya serta penggunaan barang dan jasa budaya, terutama bagi kelompok dan individu yang terpinggirkan atau rentan; dan 6) Mengintegrasikan secara penuh kebudayaan dan kreativitas ke dalam rencana dan strategi pembangunan lokal.

**Tabel 1.** Analisis Kepatuhan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap Kerjasama UCCN

No	Mandat	Implementasi	Capaian SDGs	
			Tujuan	Target
<b>Kontribusi terhadap manajemen global UCCN</b>				
1	Kontribusi terhadap manajemen global jaringan	Secara rutin mengikuti pertemuan tahunan UCCN	17	17.6
<b>Inisiatif utama yang diterapkan di tingkat lokal untuk mencapai tujuan UCCN</b>				
2	Menjadikan kreativitas sebagai komponen penting dari pembangunan perkotaan, terutama melalui kemitraan yang melibatkan sektor publik dan swasta serta masyarakat sipil	Menjadikan batik sebagai warisan budaya yang terus dikembangkan sebagai sumber kreativitas dan ekonomi di Pekalongan yang berhasil menyerap 12.937 dengan 60% pekerja perempuan sesuai Roadmap Pembangunan Ekonomi Kreatif 2019	8	8.2
				8.3
				8.5
3	Memperkuat kreasi, produksi, distribusi dan penikmatan barang dan jasa budaya dan pembinaan ekonomi kreatif;	Menjadikan batik sebagai bagian dari perda dan memberikan payung hukum bagi pengrajin dan pembeli	8	8.8
			17	17.14
		Membuat kalender event Seni Kriya dan menyelenggarakan berbagai festival budaya yang terbuka untuk umum	8	8.9
			11	11.4
		Mendukung inovasi teknologi untuk meningkatkan industry kreatif batik dengan meluncurkan aplikasi belanja online dan mengintegrasikan Aplikasi Batik Augmented Reality di destinasi wisata budaya	8	8.3

4	Meningkatkan akses dan partisipasi, partisipasi dalam kehidupan budaya serta penikmatan barang dan jasa budaya, khususnya untuk kaum marginal dan rentan	Penyediakan pelatihan pelestarian batik bagi semua masyarakat, termasuk perempuan dan narapidana dengan	4	4.3
		berbagai tema, termasuk digital	5	4.4
		marketing dan produksi batik bersih, bagi semua masyarakat, termasuk perempuan dan narapidana	8	5.5
			12	8.6
5	Mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi serta memperluas peluang bagi pencipta dan profesional di bidang budaya	Membangun ifrastruktur pendukung industri kreatif batik dengan	8	8.9
		menciptakan kampung budaya dan membangun akses keluar jalan tol di depan sentra batik Setono	11	11.4
6	Mengintegrasikan budaya dan kreativitas ke dalam strategi dan rencana pembangunan lokal	Membangun Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan	8	8.3
7	Meningkatkan peningkatan kesadaran tentang UCCN dan peran budaya dan kreativitas dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan mendukung penelitian dan analisis di bidang khusus ini.	Bekerjasama dengan berbagai aktor baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mengirangi dampak buruk batik bagi lingkungan	6	6.3
			12	12.4
<b>Inisiatif utama dilaksanakan melalui kerjasama antar kota untuk mencapai tujuan UCCN</b>				
8	Meningkatkan kerjasama antar anggota UCCN untuk mewujudkan tujuan jaringan	kerjasama dengan Heidelberg (Kota Sastra) untuk mengkolaborasi batik dan puisi.	17	17.6

*Sumber: diolah penulis Mission Statement UCCN, Laporan Monitoring UCCN, sdg2030indonesia.org*

Dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa kota Pekalongan dapat menyesuaikan perilakunya dengan aturan yang disepakati oleh UCCN dengan kata lain Pemerintah Kota Pekalongan patuh terhadap kerjasama yang disepakati karena berperilaku sesuai dengan misi, tujuan, serta mandat dari UCCN. Di mana perilaku yang sesuai dengan peraturan dari kerjasama internasional disebut dengan perilaku patuh. Hal ini merujuk pada definisi kepatuhan dari Ronald B. Mitchell (2007) dan Oran R. Young (1979). Kemudian, untuk melihat ukuran kepatuhan tersebut dibuktikan dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang sanggup mewujudkan semua indikator kepatuhan baik itu Output, Outcome, dan Impact (Mitchell, 2007).

Adapun motif kepatuhan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap UCCN ini dapat dikatakan karena tujuan dari UCCN untuk menjadikan budaya sebagai inti pembangunan kota kreatif sesuai dengan karakteristik Kota Pekalongan sebagai kota industri yang berkembang dari tradisi yang sudah mengakar sejak lama. Selain itu, tujuan UCCN juga sesuai dengan maksud Kota Pekalongan untuk mewujudkan Kota Ekonomi Kreatif sesuai dengan Peraturan Presiden No. 142 tahun 2018 tentang Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2015 (Reindekraf). Efisiensi inilah yang mendorong Pemerintah Kota Pekalongan terus mematuhi UCCN.

Bergabungnya Pemerintah Kota Pekalongan sebagai anggota UCCN telah mendatangkan berbagai keuntungan baik dari segi ekspor maupun efisiensi dalam mencapai dua kerjasama internasional dan kewajiban menjalankan perpres yang ada di Indonesia. Menurut Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, kepatuhan Pemerintah Kota Pekalongan dapat disimpulkan didorong oleh faktor efisiensi (Chayes & Chayes,

1993: 178–187) karena adanya perhitungan dari banyaknya keuntungan yang didapat oleh Pemerintah Kota Pekalongan selama menjalankan mandat-mandat dari UCCN.

Membandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan tema mewujudkan SDGs melalui kota kreatif, tulisan dari Zinkernagel et al., (2018) berfokus pada meninjau evolusi indikator untuk memantau pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk memahami bagaimana 'baru' indikator yang disarankan oleh Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB untuk kota dan tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam menggunakannya. Salah satu perbedaan utama indikator SDG dibandingkan dengan rangkaian indikator yang digunakan sebelumnya adalah jumlah indikator yang lebih banyak dalam sistem SDG. SDGs sendiri mencakup aspek-aspek keberlanjutan yang belum tercakup sebelumnya, yaitu aspek kesetaraan gender dan pengurangan ketimpangan. Namun demikian, tulisan tersebut menyarankan adanya penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana mengadaptasi SDGs, target dan indikator untuk konteks perkotaan tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memberikan penjelasan yang lebih detail bagaimana implementasi SDGs, target dan indikator dilakukan secara nyata di Kota Pekalongan. Meskipun tidak semua indikator SDGs tercapai, penelitian ini menyajikan temuan bagaimana aspek dalam pembangunan berkelanjutan yang sebelumnya belum tercapai dalam perwujudan kota yang berkelanjutan misalnya aspek kesetaraan gender dan pengurangan ketimpangan dapat dicapai di Kota Pekalongan dengan batiknya yang memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan kaum marginal

Kemudian, tulisan Grisana Puspeng (2020) juga membahas bagaimana perwujudan Kota Kreatif di ASEAN dan berfokus pada berwujudan tiga pilar keberlanjutan kreativitas, yaitu kepemimpinan dan penegakan pendidikan seni, pemahaman yang jelas tentang kreativitas dan hubungannya dengan warisan budaya, keanekaragaman, inklusivitas dan pendekatan bottom-up. Meskipun membahas bagaimana pendidikan berkaitan dengan kebudayaan dan kreativitas dapat membantu dalam mewujudkan kreatif sesuai SDGs, Pekalongan yang memiliki contoh bagaimana peraturan daerah memperkuat implementasi pendidikan budaya ke dalam kurikulum pendidikan baik formal maupun non formal. Di samping itu, Kota Pekalongan juga menunjukkan bagaimana upaya pelestarian Batik sejalan dengan SDGs baik sebelum ditunjuk menjadi kota kreatif ataupun setelah penunjukannya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga masih jarang membahas Kota Pekalongan saat mendiskusikan kota kreatif (Centre for Liveable Cities Singapore, 2017; Khoo, 2020; Kong, 2012; Zinkernagel et al., 2018). Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang masih jarang mengangkat Kota Pekalongan saat membahas mengenai kota kreatif meskipun Kota Pekalongan merupakan kota pertama di Kawasan Asia Tenggara yang masuk ke dalam jaringan kota kreatif UNESCO.

## **KESIMPULAN**

Batik Pekalongan sejak awal berkembang bebas dari nilai-nilai kerajaan yang mengikat sehingga batik menjadi seni rakyat dan menjadi wadah bagi pengrajin batik berekspresi mengikuti selera para pembeli. Latar belakang inilah yang kemudian mengantarkan Batik Pekalongan sebagai pilar ekonomi dalam kehidupan masyarakat di sana dan membuat Kota Pekalongan dapat tergabung dalam UCCN. UNESCO menggarisbawahi Kota Pekalongan menjadi teladan bagaimana budaya dapat mendukung

perkembangan masyarakatnya, khususnya kaum marginal, dengan menggerakkan perekonomian yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Sebagai anggota UCCN, Pemerintah Kota Pekalongan berarti harus menjalankan semua komitmen dan mandat yang disepakati. Berdasarkan komitmen yang disepati, para anggota harus memperkuat kerjasama dengan kota-kota yang telah mengidentifikasi kreativitas sebagai faktor strategis untuk pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keseuaian perilaku pemerintah Kota Pekalongan dalam menjalankan mandat-mandat yang disepakati dilihat melalui berbagai indikator. Indikator tersebut digunakan untuk melihat seberapa kuat upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk menjadikan budaya sebagai inti dalam pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh UCCN. Indikator *output* menunjukkan beberapa kebijakan dan regulasi daerah yang berpusat pada pelestarian budaya. Sementara *outcome*, menunjukkan berbagai upaya pemerintah kota pekalongan yang membangun berbagai destinasi budaya dan festival budaya untuk menaikkan sektor pariwisata, memberikan berbagai jenis pelatihan yang dapat diakses oleh semua orang untuk meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi dampak buruk batik bagi lingkungan dengan bekerjasama bersama dengan berbagai pihak baik internasional maupun nasional untuk membangun infrastruktur pendukung industry batik serta mendorong adanya produksi batik ramah lingkungan. Adapun *outcome* tersebut juga telah mengintegrasikan tiga pilar keberlanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. *Impact* atau dampak yang didapat pemerintah setelah mengimplementasikan framework UCCN tersebut adalah ekspor pemerintah Kota Pekalongan yang semakin naik tiap tahunnya bahkan di saat pandemic, masih banyaknya para pengrajin batik di Kota Pekalongan juga menunjukkan bahwa batik di sana masih dilestarikan dengan baik, batik di Kota Pekalongan telah memiliki iklim ketahanan yang baik karena masih dapat berkembang bahkan di saat krisis melanda.

## REFERENSI

- Agussalim, D., Umar, A. R. M., Larasati, K., & Tobing, D. H. (2019). Localizing the Sustainable Development Goals: Assessing Indonesia's Compliance towards the Global Goals. In D. Holzhaecker, Ronald; Agussalim (Ed.), *Sustainable Development Goals in Southeast Asia and ASEAN* (pp. 39–61). Brill. [https://doi.org/10.1163/9789004391949\\_003](https://doi.org/10.1163/9789004391949_003)
- ANTARA. (2019, October 10). *Pekan Batik Pekalongan bukukan transaksi Rp7,411 miliar*. <https://www.antaranews.com/berita/1105872/pekan-batik-pekalongan-bukukan-transaksi-rp7411-miliar>
- ANTARA Jateng. (2018, August 20). *Hologram batik Pekalongan disempurnakan dengan QR-Code*. <https://jateng.antaranews.com/berita/199080/hologram-batik-pekalongan-disempurnakan-dengan-qr-code>
- ANTARA News. (2020, November 11). *Pemkot Pekalongan-UI lakukan finalisasi indikasi geografis batik*. <https://www.antaranews.com/berita/1833452/pemkot-pekalongan-ui-lakukan-finalisasi-indikasi-geografis-batik>
- Arianto, Z. (2018). *Upaya Pemerintahan Joko Widodo dalam Mendorong Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- BBC. (2021, February 6). *Village submerged by red water after flood hits batik factory*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-55966175>
- BPS. (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019. In *Badan Pusat Statistik*.

- <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YjdINmNkNDBhYWVhMDJiYjZkODlhODI4&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1Ym xpY2F0aW9uLzIwMTgvMDYvMDQvYjdINmNkNDBhYWVhMDJiYjZkODlhODI4L2tYWRhYW4tYW5na2F0YW4ta2VyamEtZGktaW5kb25lc2lhLWZlYnJlYXJpLTIwMTgu>
- DINPERINAKEK Kota Pekalongan. (2019, July). *Fasilitas Sertifikasi Profesi Batik, Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Tingkatkan Kesejahteraan Pengerajin Batik*. <https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/berita/fasilitas-sertifikasi-profesi-batik-upaya-pemerintah-kota-pekalongan-tingkatkan-kesejahteraan-pengerajin-batik.html>
- DINPERINAKEK Kota Pekalongan. (2020, May 11). *EDUKASI PENGRAJIN BATIK MELALUI PELATIHAN PRODUKSI BERSIH DI DINPERINAKEK KOTA PEKALONGAN*. <https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/berita/edukasi-pengrajin-batik-melalui-pelatihan-produksi-bersih-di-dinperinaker-kota-pekalongan.html>
- DINPERINAKEK Kota Pekalongan. (2021, September 6). *KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN PROSES PRODUKSI BERSIH*. <https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/berita/kegiatan-pelatihan-pengembangan-proses-produksi-bersih.html>
- Elliott, I. M. (1984). *Batik: Fabled Cloth of Java*. Periplus Editions (HK) Ltd.
- Goodland, R. (1995). The Concept of Environmental Sustainability. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 26, 1–24. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.26.110195.000245>
- Kementerian Perindustrian. (2017). *Kemenperin Berikan Perhatian IKM Kapal dan Batik di Pekalongan*. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/16828/Kemenperin-Berikan-Perhatian-IKM-Kapal-dan-Batik-di-Pekalongan>
- KMNIU. (2019, October 9). *Pemerintah Kota Pekalongan Dorong Perajin Batik Gunakan Bahan Pewarna Alami Lewat Lokakarya “Batik Masa Depan Back to Nature” – Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO*. <https://kniu.kemdikbud.go.id/?p=4310>
- KWRI UNESCO. (2017, June 13). *Jurusan teknologi batik, hanya ada di Indonesia*. <https://kwri.kemdikbud.go.id/berita/jurusan-teknologi-batik-hanya-ada-di-indonesia/>
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law. In J. Brunee, D. Bodansky, & E. Hey (Eds.), *Oxford Handbook of International Environmental Law* (pp. 893–921). Oxford University Press.
- Pemerintah Kota Pekalongan. (2021). *Hadiri Workshop Pemberdayaan Perempuan, Inggit: Perempuan Harus Mandiri dan Kreatif*. <https://pekalongankota.go.id/berita/hadiri-workshop-pemberdayaan-perempuan-inggit-perempuan-harus-mandiri-dan-kreatif-1825.html>
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2017, April 10). *MENCARI ‘OBAT’ ROB KE NEGERI BELANDA*. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/mencari-obat-rob-ke-negeri-belanda/>
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2019, March 15). *Pemkab Pekalongan Lakukan Kerjasama Dengan Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang*. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-pekalongan-lakukan-kerjasama-dengan-kota-pekalongan-dan-kabupaten-batang/>

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2020, November 18). *Perluas Pasar UMKM, Pekalongan Luncurkan Lokapasar Batik - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/perluas-pasar-umkm-pekalongan-luncurkan-lokapasar-batik/>
- PKMBRP UNDIP. (2018, January 18). *PKMBRP UNDIP Jalin Kerjasama Dengan Pemerintah Kota Pekalongan - PKMBRP Undip*. <https://pkmbrrp.undip.ac.id/pkmbrrp-undip-jalin-kerjasama-dengan-pemerintah-kota-pekalongan/>
- Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan. (2020, November 20). *Gandeng Unsoed, Pemkot Pekalongan Tangani Limbah Batik Pakai Jamur*. <https://protokol.pekalongankota.go.id/berita/gandeng-unsoed-pemkot-pekalongan-tangani-limbah-batik-pakai-jamur.html>
- Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan. (2021, August 30). *Pandemi, Puluhan Pelaku UMKM dibekali Pelatihan Pemasaran Online*. <https://protokol.pekalongankota.go.id/berita/pandemi-puluhan-pelaku-umkm-dibekali-pelatihan-pemasaran-online.html>
- Stephenson, N. (1993). The Past, Present, and Future of Javanese Batik: A Bibliographic Essay. *Journal of the Art Libraries Society of North America*, 12(3), 107–113. <https://doi.org/10.1086/adx.12.3.27948560>
- Stevenson, D. (2020). Rethinking Creative Cities?: UNESCO, Sustainability, and Making Urban Cultures. In X. Gu, M. K. Lim, & J. O'Connor (Eds.), *Re-Imagining Creative Cities in Twenty-First Century Asia* (pp. 59–74). Springer Nature Switzerland AG. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-46291-8\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-46291-8_1)
- Tirta, I. (2009). *Batik: Sebuah Lakon*. Gaya Favorit Press.
- UCLG. (2018). *Culture in the Sustainable Development Goals: A GUIDE FOR LOCAL ACTION*.
- UNCTAD. (2008). The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy-making. In *United Nations*. [http://unctad.org/en/Docs/ditc20082cer\\_en.pdf%5Cnhttp://www.oecd.org/dataoecd/35/56/2101733.pdf%5Cnhttp://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1595%5Cnhttp://www.isc.hbs.edu/Innov\\_9211.pdf](http://unctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf%5Cnhttp://www.oecd.org/dataoecd/35/56/2101733.pdf%5Cnhttp://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1595%5Cnhttp://www.isc.hbs.edu/Innov_9211.pdf)
- UNESCO. (2004). *Mission Statement* (Vol. 94, Issue 1). <https://doi.org/10.4324/9780429501074-25>
- UNESCO. (2009). *Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in Pekalongan*. <https://ich.unesco.org/en/BSP/education-and-training-in-indonesian-batik-intangible-cultural-heritage-for-elementary-junior-senior-vocational-school-and-polytechnic-students-in-collaboration-with-the-batik-museum-in-pekalongan-00318>
- Veldhuisen, H. C. (2007). *Batik Belanda 1840-1940: Sejarah dan Kisah-Kisah di Sekitarnya*. Gaya Favorit Press.